

Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

¹Nurhasanah R, ²Adriani, ³Bonita Bilqis, ⁴Ausia Ariana Putri

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Bone

email: zhananurhasanah@gmail.com

^{2,3,4}Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Jln. A. Malla

E-mail: bonitabilqis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melaksanakan perannya, komite sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah perencanaan program dan dalam hal ini komite sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Peran komite sekolah sudah baik sebagai pemberi pertimbangan, pelaksanaannya pengamatan peneliti dalam bentuk pemberian masukan dalam hal sarana dan prasarana. Selain peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan juga sebagai pendukung sekolah baik dalam tujuan pencapaian sekolah dan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah cukup baik dalam membina hubungan dengan masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tenaga pendidik, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Mutu pendidikan

PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan¹.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan (output) yang memiliki kemampuan atau kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, yang secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup (life skill)². Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. *Faktor pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education function atau *input-output* analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. *Faktor kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik. *Faktor ketiga*, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim³.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Manajemen berbasis sekolah adalah pelibatan seluruh anggota masyarakat sekolah (siswa, guru, staf, komite sekolah dan kepala sekolah) dalam berbagai bidang demi upaya peningkatan mutu.⁴ Manajemen berbasis sekolah menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengolah potensi

¹Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

²Aminatul Zahroh, *Total Quality Managemen* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

³Akbariz Rahmad, "Rendahnya Mutu Pendidikan Kita," [Http://Akbarizrahmads.Blogspot.Com/2010/03/Rendahnya-Kualitas-Pendidikan-Di.Html?](http://Akbarizrahmads.Blogspot.Com/2010/03/Rendahnya-Kualitas-Pendidikan-Di.Html?)

⁴ABDULLAH K, "Urgensi Impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Di Sekolah," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8.1 (2019): 745.

sumber daya pendidikan melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tujuan peningkatan mutu sekolah.⁵

Salah satu wujud aktualisasi pelaksanaan MPMBS adalah dibentuknya suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan⁶. Dalam lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, Komite Sekolah yaitu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, pendidikan sekolah, maupun pendidikan luar sekolah⁷. Menurut Khaeruddin, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan madrasah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan⁸.

Menurut Kemendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, Dewan Pendidikan bertujuan untuk (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan⁹.

Untuk dapat melaksanakan perannya, komite sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah perencanaan program atau dalam hal ini komite sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan

⁵ Ibid.

⁶Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008).

⁷Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

⁸Khaeruddin, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007).

⁹Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

suatu cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran komite sekolah agar tujuan dibentuknya komite sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metode Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif bersifat *generating theory*. Teori yang dihasilkan bukan teori substansif dan teori-teori yang diangkat dari dasar¹⁰.

Dalam penelitian ini peneliti hanya mencari gambaran dan data yang bersifat deskriptif tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka teknik analisis data mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus-menerus. Adapun langkah-langkah analisis data meliputi: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) verifikasi¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara umum kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Berdasarkan UU SISDIKNAS (2002:112) komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan internal sekolah maupun pendidikan di luar sekolah. Pembentukan Komite Sekolah telah ditetapkan dalam keputusan Mendiknas

¹⁰“Metode Penelitian,” <https://Duniayasiayu.Files.Wordpress.Com/2009/12/Metodepenelitian12.Pdf>.

¹¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

No.044/U/2002 diharapkan sasaran yang akan dicapai dalam perbaikan mutu pada program pembinaan pendidikan dasar dan menengah diantaranya agar terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat dengan mengenalkan konsep dan pemberdayaan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dari kutipan di atas keberadaan komite sekolah diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan menyadarkan masyarakat atas peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan terciptanya kondisi transparan dan akuntabel dan demokratis. Peningkatan partisipasi dimaksudkan terciptanya lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (karyawan, staf, guru, siswa) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, usahawan, dan sebagainya) dapat terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Adapun fungsi Komite Sekolah menurut UU Sisdiknas (2003: 122) sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 1) kebijakan dan program pendidikan 2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah

- (RAPBS) 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan 4) Kriteria tenaga kependidikan 5) Kriteria fasilitas pendidikan, dan 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.¹²

¹²Muhammad Munawir Pohan, "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Ansiru PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2018), 101-102.

B. Mutu Pendidikan

Mutu merupakan topik penting dalam diskusi tentang pendidikan sekarang ini. Mutu menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat, dan pemuka bisnis untuk bekerja sama guna memberikan kepada para siswa sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat, bisnis dan akademik sekarang dan masa depan. Menurut Jarome S. Arcaro Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu pendidikan yang dimaksud disini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dalam Dictionary of Education, pendidikan merupakan: (a) proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dimana dia hidup, (b) proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual yang optimum.

Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan. Kerangka filosofi pendidikan dalam pengembangan sekolah bermutu adalah kesesuaian input, proses, dan hasil sekolah dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Kerangka filosofi ini harus menjadi kerangka berpikir seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan di dalam satuan pendidikan.

Pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan pendidikan terdiri dari pihak internal dan eksternal. Stakeholder pendidikan internal meliputi: peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan stakeholder pendidikan eksternal meliputi: calon peserta didik, orang tua, pemerintah (pusat daerah), masyarakat umum, dan masyarakat khusus (seperti dunia usaha dan dunia industri). Pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) antara lain meliputi pihak-pihak internal dan pihak-pihak eksternal :

1. Pihak internal

- 1) Orang tua siswa

- 2) Siswa
- 3) Guru
- 4) Pegawai sekolah/madrasah
- 5) Komite sekolah/madrasah
- 6) Kepala sekolah/madrasah
- 7) Kepala desa/kelurahan, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya
- 8) Unsur masyarakat lainnya (kalo ada), termasuk di dalamnya kelompok petani atau nelayan, atau golongan etnis minoritas atau pengusaha, dan lain-lain, sesuai dengan keadaan setempat.

2. Pihak eksternal

- 1) Standar akreditasi Ban S/M
- 2) Standar kriteria sekolah/madrasah mandiri/standar internasional (RM/S BI atau M/S BI)
- 3) Standar kriteria sekolah/madrasah nasional (S/MSN)
- 4) Standar kriteria sekolah/madrasah dan PT favorit pada tingkat lanjutan.

Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pendidikan yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal. Secara umum, orientasi manajemen mutu sekolah adalah peningkatan mutu layanan pendidikan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi pendidikan melalui perbaikan kinerja sekolah, serta peningkatan mutu kinerja dalam upaya menghasilkan lulusan pendidikan yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan stakeholders.

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Dalam hal ini sekolah diuntut untuk bisa memberikan kepuasan kepada pengguna jasa pendidikan dengan cara meningkatkan kinerja personil sekolah (kepala sekolah, guru, dan karyawan). Sekolah harus lebih kreatif dalam mengembangkan program sekolah, meningkatkan kualitas belajar mengajar dan mengelola manajemen dengan baik agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

Pendidikan adalah hal penting bagi kehidupan manusia, karena manusia akan sulit berkembang dan terbelakang tanpa pendidikan dan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang bermutu. Kemajuan suatu bangsa di tentukan oleh seberapa besar bangsa tersebut menganggap penting terhadap pendidikan. Sekolah adalah tempat untuk melaksanakan pendidikan didalam PP. No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar selama 9 tahun terdiri dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kemajuan zaman di tentukan oleh majunya pendidikan maka dari itu program wajib belajar untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman, sekolah sebagai sarana pendidikan diharapkan dapat memberikan kualitas yang sangat baik dan peran aktif dari semua pihak yang menginginkan pendidikan bermutu (kepala sekolah, guru, staf pendidikan, pemerintah, masyarakat dan orang tua).

Menurut standar ISO 8402 Quality Manajemen and Quality Assurance Vocabulary (1994), mutu pendidikan adalah “keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu produk atau jasa yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan secara langsung/tersurat maupun secara tidak langsung/tersirat”. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari output pendidikan yang mampu menghasilkan produk/keluaran yang baik dan layanan jasa pendidikan yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa pendidikan. Mutu adalah pelayanan terbaik dari pemberi jasa pendidikan kepada pengguna jasa pendidikan melalui kinerja yang optimal yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan karena inti dari mutu adalah kepuasan.¹³

C. Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari upaya komite dalam menggalang dana dari masyarakat. Komite sekolah cukup baik dalam menggalang dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Sebagai payung hukumnya dalam menggalang dana dari

¹³Denti Ria Riyanti, “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MI Pembangunan UIN Jakarta” (2016), 7-12.

masyarakat komite sekolah berlandaskan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sangat clear. Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Selain itu komite sekolah juga berupaya untuk selalu menjalin hubungan dengan masyarakat melalui komunikasi yang intensif. Diketahui bahwa komite sekolah cukup baik dalam membina hubungan dengan masyarakat,¹⁴ serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tenaga pendidik, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah.¹⁵ Di era demokrasi dan partisipasi, transparansi serta akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, namun saat ini semua komponen itu harus berlaku menyeluruh dalam segala sektor, termasuk dalam manajemen sektor publik. Menurut Bastian dalam Halim menyebutkan bahwa sektor publik adalah bidang yang membicarakan metoda manajemen negara. Entitas Sekolah dan Komite Sekolah merupakan entitas Sektor Publik yang secara prinsip adalah organisasi yang mengelola uang dan keuangan negara, yang harus dipertanggungjawabkan secara keuangan negara.¹⁶

KESIMPULAN

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan internal sekolah maupun pendidikan di luar sekolah. Adapun peran komite sekolah yaitu: Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah sebagai mendukung, peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan peran komite sekolah sebagai mediator. Mutu pendidikan

¹⁴ F Dwiyama et al., "Manajemen Humas: Membangun Peran Masyarakat Pada Lembaga Pendidikan," *jurnal.iain-bone.ac.id* (n.d.), accessed August 25, 2020, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/view/868>.

¹⁵ F Dwiyama - Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan and undefined 2019, "BRAND IMAGE: UPAYA MEMASARKAN PENDIDIKAN BAGI LEMBAGA YANG KURANG MAMPU BERSAING," *mail.jurnal.iain-bone.ac.id* (n.d.), accessed August 27, 2020, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/viewFile/424/349>.

¹⁶Latief Surjana, 'Fungsi Dan Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi Di SMK Negeri 2 Dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya', *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 1.2 (2017), 122.

merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan. kerangka filosofi pendidikan dalam pengembangan sekolah bermutu adalah kesesuaian input, proses, dan hasil sekolah dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Kerangka filosofi ini harus menjadi kerangka berpikir seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan di dalam satuan pendidikan. Mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari output pendidikan yang mampu menghasilkan produk/keluaran yang baik dan layanan jasa pendidikan yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa pendidikan. Mutu adalah pelayanan terbaik dari pemberi jasa pendidikan kepada pengguna jasa pendidikan melalui kinerja yang optimal yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan karena inti dari mutu adalah kepuasan.

DAFTAR PUSTAKA

Danim, Sudarman. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Dwiyama, F, A Adriani, ... I Ismia - Adara: Jurnal, and undefined 2020. "Manajemen Humas: Membangun Peran Masyarakat Pada Lembaga Pendidikan." *jurnal.iain-bone.ac.id* (n.d.). Accessed August 25, 2021. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/view/868>.

F Dwiyama - Adara: Jurnal Manajemen Pendidikan and undefined 2019, "BRAND IMAGE: UPAYA MEMASARKAN PENDIDIKAN BAGI LEMBAGA YANG KURANG MAMPU BERSAING," *mail.jurnal.iain-bone.ac.id* (n.d.), accessed August 27, 2020, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/viewFile/424/349>.

K, ABDULLAH. "Urgensi Impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Di Sekolah." *Adara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 744–760.

Khaeruddin. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Mulyasana, Dedy. *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Pendidikan, F Dwiyama - Adara: Jurnal Manajemen, and undefined 2019. "BRAND IMAGE: UPAYA MEMASARKAN PENDIDIKAN BAGI LEMBAGA YANG KURANG MAMPU BERSAING." *mail.jurnal.iain-bone.ac.id* (n.d.). Accessed August 25, 2021. <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/viewFile/424/349>.

Pohan, Muhammad Munawir. "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Ansiru*

PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam 2, no. 2 (2018).

Rahmad, Akbariz. “Rendahnya Mutu Pendidikan Kita.”

Http://Akbarizrahmads.Blogspot.Com/2010/03/Rendahnya-Kualitas-Pendidikan-Di.Html?

Riyanti, Denti Ria. “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MI Pembangunan UIN Jakarta” (2016).

Suparlan. *Membangun Sekolah Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.

Surjana, Latief. “Fungsi Dan Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan : Studi Di SMK Negeri 2 Dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya.” *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* 1, no. 2 (2017).

Zahroh, Aminatul. *Total Quality Managemen*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

“Metode Penelitian.” *Https://Dunianyasiayu.Files.Wordpress.Com/2009/12/Metodepenelitian12.Pdf*.